

BAB IV	HUBUNGAN ANTARA KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN YANG MURAH	
	A. PENGANTAR	60
	B. KEWAJIBAN RUMAH SAKIT	62
	C. UNSUR-UNSUR PENYELENGGARAAN KESEHATAN YANG MURAH	68
	D. HUBUNGAN ANTARA KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP PENYELENGGARAAN KESEHATAN YANG MURAH	73
	E. ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP PENYELENGGARAAN KESEHATAN YANG MURAH	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. KESIMPULAN	84
	B. SARAN	86
	DAFTAR PUSTAKA	88

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini, Sekar Ayu Paramita, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 08.93.0031,

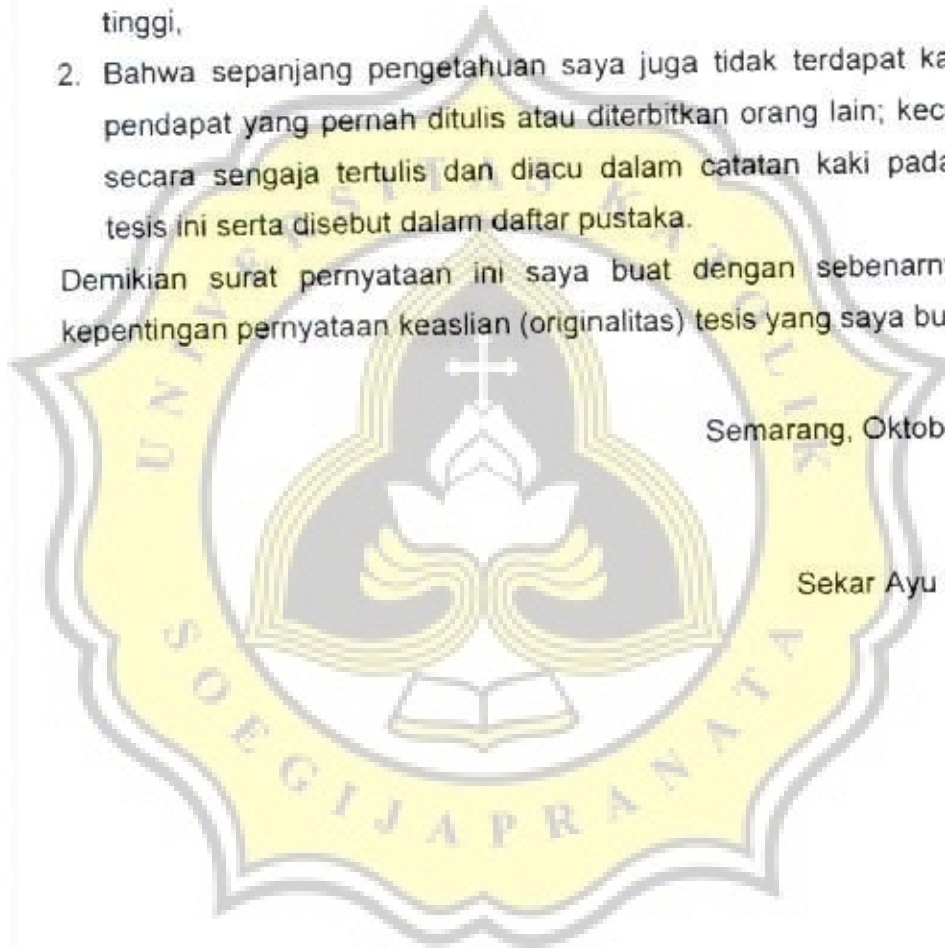
Menyatakan:

1. Bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi,
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam catatan kaki pada naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Semarang, Oktober 2010

Sekar Ayu Paramita



ABSTRAK

HUBUNGAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP PENYELENGGARAAN KESEHATAN YANG MURAH

Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga mengakibatkan mahal biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Rumah Sakit berkewajiban menyediakan sarana pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Namun pada kenyataannya tidak demikian, beberapa Rumah Sakit tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Tentu saja hal ini melanggar penyelenggaraan kesehatan yang murah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sehubungan dengan cara ilmiah, maka metode, menyangkut dengan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian, pengertian dari kata "metode" berarti suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu cara atau rencana tertentu.

Kewajiban Rumah Sakit dalam UU No.44 tentang Rumah Sakit secara substansial telah melanggar hak masyarakat atas Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah. Hal ini dikarenakan pasal 2, 3 dan 29 yang kontradiktif dengan pasal 21 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Privat merupakan badan hukum bertujuan profit bertentangan dengan fungsi sosial Rumah Sakit dalam Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah. Maka ketentuan ini selayaknya ditinjau kembali.

Kata kunci; Kewajiban Rumah Sakit, Penyelenggaraan Kesehatan yang Murah

ABSTRACT

THE OBLIGATION OF HOSPITALS IN PROVIDING CHEAP HEALTH SERVICE

Normative Law Analysis to Undang-Undang Republik Indonesia No.44/2009 about Hospital

The Hospital needs of operational funding and big investment in order to run its program and activities had impacts in high health service cost. UU No.44 2009 about Hospitals define the Hospitals have obligation to provide health service for the poor, though in fact, some Hospitals didn't obey this. This means the Hospital Obligation is not enough to provide cheap health service for the poor.

This is a descriptive study using normative juridical method, means a research or investigation according to a defined plan or way to understand the objects in the study.

Hospital obligation in UU No.44 2009 had substantially brake community rights of cheap health service because it has contradiction points within the legislation itself. Section 2, 3, and 29 of the UU No 44 2009 pull some contradiction to section 21 of UU No44 2009 define that private Hospitals is a low firm with profit purpose and this clearly is a violation to the social function of Hospitals in providing cheap health service.

Keywords: *The Obligation of Hospitals, Provide Cheap Health Service*